

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah: **“PENYELENGGARAAN OTONOMI DESA DI DESA LUKUN KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DESA”**.

Dalam rangka untuk melaksanakan otonomi desa sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dilihat dari kewenangan desa yaitu kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa, memang tidak semudah apa yang diungkapkan. Berbagai kendala dihadapi oleh Pemerintah Desa Lukun dalam mewujudkan tujuan dari undang-undang tersebut. Oleh karena itu melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui pelaksanaan otonomi desa tersebut dari beberapa kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa.

Dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah Desa dan BPD Dalam Mewujudkan Otonomi Desa Didesa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta apa faktor penghambat Pemerintah Desa dan BPD dalam mewujudkan otonomi desa di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kepulauan Meranti.

Penelitian yang diadakan ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data yang didapat langsung dari responden penelitian, disamping itu, penelitian sosiologis juga dimaksudkan untuk mengungkap efektifitas berlakunya suatu aturan hukum yang berlaku pada masyarakat. Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian ini ditujukan semata-mata untuk mengetahui gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terhadap bagaimana perlindungan hukum terhadap hak masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa peran Pemerintah Desa dan BPD dalam mewujudkan otonomi desa di Desa Lukun, yang dilihat dari kewenangan desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan terhadap masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa, belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena masih tergendala kepada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan BPD, yakni keterbatasan sarana, kekurangan biaya, serta kondisi geografis yang kurang mendukung karena berada di sekitar laut, sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Sedangkan faktor penghambat Pemerintah Desa dan BPD dalam mewujudkan otonomi desa di Desa Lukun, antara lain adalah administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang belum sempurna, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga belum maksimal. Kemudian juga sumber daya alam yang terbatas, masih rendahnya sumber daya manusia, serta anggaran yang belum memadai, sehingga pembangunan desa sulit untuk dilakukan secara sempurna dan maksimal.